

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Arifin 2018).

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Laoly, 2019). Dimana penyerapan anggaran termasuk indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah. Menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah adalah dengan melihat penyerapan anggarannya. Terjadinya tingkat penyerapan anggaran dapat mengetahui suatu kinerja/kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan disetiap program yang sudah ditentukan (Makmur 2015).

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah (Elim et al. 2018).

Penyerapan anggaran adalah tingkat dari realisasi anggaran yang di rencanakan. Penyerapan anggaran ini diukur dengan anggapan bahwa semakin banyaknya program yang dijalankan dalam suatu periode, maka semakin maksimal pula tingkat penyerapan anggaran yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi. Kurangnya tingkat penyerapan anggaran merupakan masalah utama dalam proses penganggaran, dimana jumlah anggaran yang direncanakan tidak menggambarkan nominal realisasi anggaran yang telah dicapai. Hal ini menimbulkan kelebihan anggaran yang kemudian harus dikembalikan ke pusat dan menyebabkan penilaian rendah terhadap kemampuan suatu daerah dalam mengelola anggaran yang diterimanya (Roza 2022).

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah klasik, yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Penyerapan anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat) (Malahayati dkk, 2015). Seharusnya, pada pertengahan tahun tingkat penyerapan anggaran diharapkan sudah

mencapai 50% dan dapat meningkat 100% diakhir tahun. Penyerapan anggaran Negara memerlukan adanya perimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan kontinu (Suheri, 2019).

Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (BPKP,2011). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (Elim et al. 2018).

Perencanaan merupakan acuan penyusunan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan periode tertentu. Perencanaan mengacu pada persiapan pendapatan, pengeluaran dan rencana keuangan untuk periode tertentu. Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi aspek yang melekat dalam perencanaan anggaran, karena program tersebut disusun sesuai dengan sumber anggaran yang tersedia. Menurut (Fahnur, 2018), pertimbangan perencanaan anggaran memengaruhi penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan

anggaran. Penelitian (Kuswoyo, 2011) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Gagola, dkk 2017).

Menurut (Zulaikah, B., & Burhany, 2019), pertimbangan perencanaan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan harta paling penting dari suatu organisasi/perusahaan karena keberhasilan organisasi/perusahaan sangat bergantung pada unsur manusia (Sedarmayanti, 2017). SDM sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintah. Untuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, kualitas SDM yang meliputi pengetahuan, motivasi, keterampilan, dan sikap menjadi parameter standar. Menurut (Karmilawati, 2020), SDM berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Sedangkan (Trisna et al., 2020) mengungkapkan bahwa SDM tidak memiliki pengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran (Febriani et al. 2023).

Penelitian (Oktaliza dkk, 2020) perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan anggaran karena perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, begitupun dengan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin baik komitmen manajemen, maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya. Menurut (Elim et al. 2018) pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan 5 variabel bebas yaitu pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan. Berdasarkan penelitian yang menggunakan regresi linier berganda bahwa terdapat 4 variabel bebas yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yaitu pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan. Variabel pencatatan administrasi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Mutmainna and Iqbal 2017).

Menurut (Engkus 2020) ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan menurut (Kennedy et al. 2020) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi, dan system pengendalian internal. Hasil penelitian (Yuniriza, 2019) dan (Malahayati, 2015) menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Pada penelitian ini, peneliti menyoroti beberapa faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia (Syahwildan, 2022).

Laporan keuangan adalah sumber data yang mana dapat di gunakan sebagai informasi untuk dapat mengetahui perkembangan dari suatu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Kondisi atau keadaan keuangan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat kita ketahui melalui rangkaian analisis laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga dapat di nilai kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut pada periode periode tertentu. Dalam melakukan analisis diperlukan beberapa data acuan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang mana dari data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dapat di jadikan bahan perbandingan dengan tahun-tahun yang akan datang (Haromin 2020).

Berikut contoh data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Realisasinya sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Ternate Tahun 2019-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2022	1.010.37	972,42	96,24%
2021	996.15	959,82	96.35%
2020	1.093,76	945.31	86.43%
2019	1.044,15	980,73	93.93%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022 terlihat tidak stabil karena tabelnya menunjukkan kenaikan serta penurunan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2019 penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota ternate mengalami kenaikan hingga 94,31% dan merupakan angka yang cukup fantastis akan tetapi di tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga 5,98%. Yang mana ini menandakan kurang stabilnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota ternate karena hasil dari tabel menunjukkan ada yang naik dan turun karena penyerapan yang baik

memiliki tingkat kesesuaian realisasi fisik dan realisasi anggaran. Hasil analisis tabel menunjukkan bahwa pemerintah kota ternate belum dapat menstabilkan anggaran penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per tahunnya, serta belum mampu mengoptimalkan realisasi selama empat tahun terakhir. Sehingga bisa dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kota Ternate dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih lemah karena keterambatan penyerapan anggaran membuat tingkat anggaran tidak merata.

Tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Ternate, yang menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran selama 4 tahun terakhir masih dikategorikan meningkat tapi rendah. Meningkat dan Rendahnya tingkat penyerapan anggaran maka perlu diketahui factor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Ternate. Untuk mencapai suatu kegiatan, semakin optimal penyerapan anggaran maka akan semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang lebih produktif untuk menghindari pengangguran uang daerah. Dalam hal ini, peneliti menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, Kopetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kota Ternate.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas “keterambatan diatas atau tidak memaksimalkan penyerapan anggaran

pemerintah daerah” yang masi menjadi persoalan klasik pemerintah daerah, menjadi alasan tertarik untuk meneliti mengenai factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada OPD di Pemerintah Kota Ternate.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Ternate?
2. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Ternate ?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Ternate ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sebagai berikut;

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Ternate!
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Ternate!
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Ternate!

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti lain dalam mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini. Bagi akademik,

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya. Riset ini juga bisa jadi landasan dalam peningkatan media pendidikan ataupun penerapan media pendidikan secara lanjut. Tidak hanya itu pula jadi suatu nilai tambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, secara umum pada bidang ilmu dan secara khusus pada bidang sektor publik (keuangan/anggaran). Peneliti sanggup mempraktikkan media yang cocok dalam modul pembelajaran tertentu. Serta peneliti memiliki pengetahuan serta wawasan mengenai modul serta media pembelajaran yang cocok.